KARYA ILMIAH

FUNGSI KOORDINASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

OLEH

DRS. WELSON Y. ROMPAS, MSI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MANADO
2009

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

a. Nama	: Drs. Welson Y. Rompas, MSi
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. NIP	: 131 851 628
d. Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Tkt. I, IV/b
e. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
f. Jurusan	: Ilmu Administrasi
g. Program Studi	: Administrasi Negara
h. Judul Karya Ilmiah	: Fungsi koordinasi dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah

Menyetujui :
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi,

Drs. S.M.Sumayku, MSi.-
NIP. 195409251979031002.-

Penulis,

Drs. Welson Y.Rompas, Msi.-
NIP. 196109241989031010.-

Mengetahui :
Dekan FISIP Unsrat,

Drs. Johny Lumolos, MSi.-
NIP. 195806051986031004.-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan penyertaanNya maka penulisan karya ilmiah ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan.

Karya Ilmiah ini diberi judul : Fungsi koordinasi dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya.

Semoga karya ilmiah ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Penulis,

WYR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koortdinasi..... 3
B. Konsep Perencanaan..... 5
C. Konsep Perencanaan Pembangunan 8

BAB III. FUNGSI KOORDINASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Konsep Dasar tentang Perencanaan Pembangunan Si Indonesia..... 10
B. Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah..... 13
C. Fungsi Koordinasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 19

BAB IV. KESIMPULAN..... 22

DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam GBHN (l998) telah dinyatakan bahwa cita-cita luhur Bangsa Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur, hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan meliputi semua aspek kehidupan masyarakat baik politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan keamanan, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang dikenal dengan Pelita.

Pembangunan Nasional juga telah bertumpu pada pembangunan daerah,dimana pembangunan Daerah dan pedesaan masih tetap memperoleh perhatian besar.

Hal ini tidak lain karena disamping pembangunan daerah dan desa itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang makin mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah; juga dalam rangka untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, darn meningkatkan pendayagunaan potensi daerah optimal dan terpadu

Dalam implikasinya, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, dimana masyarakat diharapkan sebagai pelaku utamanya, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Namun sebagaimana halnya di negara-negara berkembang lainnya, pemerintah beserta seluruh aparatnya masih memegang peranan penting dan bahkan dominan di dalam proses pembangunan (Siagian, 2002).

Pembangunan sebenarnya mengandung makna suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana, dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara teoritis diketahui bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan dan program-programnya, antara lain ditentukan oleh koordinasi yang baik antara badan-badan, instansi-instansi serta aparataparat perencanaan dalam hal ini pemerintah pelaksana pembangunan di semua tingkatan pemerintah. Fungsi koordinasi menjadi sangat penting oleh karena sebagian besar dari program-program pembangunan, merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga/instansi. Dan seringkali hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan tersebut, disebabkan karena kurangnya koordinasi.

BAB. II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

Istilah Koordinasi berasal dari kata Inggris Coordination . Kata koordinasi (coordination) berasal dari kata-kata: "cum" yang artinya berbeda-beda dan "ordinare" yang berarti penyusunan atau penetapan sesuatu pada keharusannya. Dari kata-kata inilah sehingga muncul kata-kata seperti: coordination, coordinating, dan sebagainya (Parista Westera, 1983).

Menurut George .R.Terry dalam N.Halim ,l972 :25) mengatakan koordinasi diartikan sebagai usaha sinkronisasi yang teratur untuk menyediakan jumlah dan timming yang tepat dan pengarahan pelaksanaan untuk menghasilkan sesuatu tindakan yang seragam dan harmonis terhadap sesuatu obyek yang telah ditentukan.

Menurut Arifin Abdul Rachman (l969:79) bahwa Koordinasi adalah kegiatan untuk menertibkan segenap kegiatan managemen maupun satu sama lain tidak simpang siur atau berlawanan ditujukan untuk pencapaian tujuan secara efesien.

Menurut Handayaningrat, (1982) bahwa kordinasi adalah salah satu usaha kerja sama, hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya;

2. Koordinasi adalah proses yang terus menerus, artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi;
3. Konsep kesatuan tindakan, hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap tindakan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama;

4. Tujuan koordinasi adalah bersama;

Sutarto (2001) mendefinisikan koordinasi yang berarti menyelaraskan, mengkoordinir, menyerasikan. Pengertian di atas adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan mengatur serta mempersatukan orang-orang, bahanbahan, alat-alat untuk menuju pada suatu tujuan secara terkoordinasi.

Winardi (2003) mendefinisikan bahwa koordinasi dapat dinyatakan sebagai suatu usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai obyek tertentu.

Sedangkan S.P.Siagian (2002) mengartikan koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha-usaha bersama untuk kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Dalam tahapan perencanaan, koordinasi mutlak dilaksanakan. Menurut Dimock and Dimock bahwa perencanaan adalah menyatakan tujuan yang akan dicapai, dab langkah-langkah logis dan sistematis untuk mencapainya; tetapi tanpa koordinasi, setiap perencanaan pasti tidak berhasil.

Koordinasi juga merupakan penjabaran untuk mencapai tujuan, namun hares dilaksanakan secara integrasi dan sinkronisasi, yaitu setiap kegiatan operasional dari setiap organisasi dilaksanakan demikian sehingga permasalahannya tidak dapat dipisahkan dari fungsi koordinasi.

Dikatakan bahwa sinkronisasi menekanksn pada waktu dan urutan pekerjaan atau prosedur kerja sedangkan integrasi menekankan kepada teknik/metode yang digunakan. Dalam hubungannya dengan tugas pelaksana/staf, maka koordinasi ditujukan kepada;

- mencegah adanya konflik dan kontradiksi; mencegah adanya persaingan yang tidak sehat; mencegah adanya kekosongan waktu; mencegah adanya pemborosan.

Untuk mencapai semua ini dipengaruhi oleh tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, koordinasi dalam hal ini hanya diperlukan dalam ruang lingkup organisasi saja misalnya suatu organisasi dimana koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi fungsional dan koordinasi diagonal yang hanya dilaksanakan dalam organisasi.

Handayaningrat (l982:117) memberikan pengertian koordinasi adalah sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi,sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi.

B. Konsep Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata "rencana" atau "plan" yang berarti karangan, rancangan atau jika ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" berarti pembuatan karangan, membuat rancangan. Perencanaan merupakan fungsi fundamental dan utama dari manajemen. Winardi (1974) bahwa Perencanaan/planning merupakan suatu fungsi fundamental daripada proses manajemen dapat juga dikatakan bahwa perencanaan merupakan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Hal ini dapat dilihat dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para sariana Administrasi yang berhubungan dengan perencanaan atau rencana. George Terry yang dikutip oleh Sondang Siagian (1975) adalah "POAC" planning (perencanaa), Organizing (Organisasi), Actualiting (penggerakan), dan Controling (pengawasan).

Melihat kedudukan Perencanaan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu basil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, bahan-bahan serta fasilitas yang tersedia, namun selalu

terbatas tetapi kebutuhan manusia tidak terbatas, karena itu anti pentingnya perencanaan sangat diperlukan.

Siagian (1975) *planning* sebagai keseluruhan dari proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan. Disini terlihat adanya serangkaian kegiatan yang akan dikerjakan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan guna mencapai hasil dimasa mendatang. Pelaksanaannya yaitu menetapkannya dalam hubunganhubungan dari berbagai hat antara lain kenyataan, dan bayangan untuk menentukan tindakan.

Menurut Church dalam Manullang (1962) bahwa perencanaan adalah sebenarnya pelaksanaan pengertian melihat kemudian hari dan khususnya terdiri dari penetapan hubungan antara berbagai-bagai hal sebelum hal itu terjadi.

Untuk memberkan suatu keputusan terhadap apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang memerlukan data/fakta. Data-data mi dipilih, dinilai dan disaring serta dihubungkan guna membuat rencana tentang masa dengan terhadap tujuan.

Moekijat (1975) bahwa perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai mass depan dalant hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Setelah data/fakta diperoleh kemudian mulai disaring, diolah untuk meramal masa depan dengan memilih alternatif terbaik sebagai satu kemungkinan untuk mengambil keputusan terhadap tujuan yang akan dicapai.

Katz dalam Azwar (1979) mengatakan bahwa perencanaan sebagai suatu kemampuan memilih satu kemungkinan (altematif) dari pelbagai kemungkinan yang ada dan dipandang paling tepat dalam rangka mencapai tujuan yang dipunyai.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa Perencanaan harus didasarkan pada kenyataan data dan keterangan yang konkrit tentang apa dan bagaimana yang kita inginkan.

- Perencanaan merupakan suatu tindakan mental yang memerlukan;
- Pemikiran, imajinasi dan kesanggupan untuk melihat kedepan;
- Perencanaan adalah menentukan mesa depan yang tepat dan tindakan yang dapat dilakukan jika ada rintangan-rintangan yang muncul serta tiba-tiba atau adanya hambatan yang mengganggu lancarnya suatu proyek atau suatu usaha.

Oleh karena itu jika dapat dikaji secara mendalam, pada dasarnya mencakup tiga hal yang besar yaitu:

I . Rencana sebagai suatu proses tentang pemilihan daripada beberapa alternatifdari tindakan yang baik untuk mencapai tujuan;

2. Rencana sebagai suatu fungsi di mana pimpinan menggunakan wewenang untuk mengubah kegiatan dan tujuan organisasi;

3. Rencana sebagai suatu keputusan apa yang akan dikerjakan pads waktu yang akan datang yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam tindakan.

Selain itu dari ketiga hal di atas maka perencanaan juga mencakup tiga dimensi waktu yaitu:

- Masa lalu
- Masa sekarang
- Masa yang akan datang

Oleh karena itu informasi, fakta, dan data serta kejadian yang kita peroleh dimasa lalu dan masa sekarang adalah bagaimana menggunakan informasi,

fakta, dan data sedangkan masa yang akan datang adalah kemampuan mengembangkan dan mengevaluasi informasi, data dan fakta untuk dapat menetapkan apa yang akan dicapai pada masa depan (sasaran tujuan yang diinginkan).

C. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada (Kartasasmita, 1997).

Pada dasarnya, perencanaan sebagai fungsi *manajemen* adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Mengacu pada pengertian di atas, maka perencanaan (rencana) harus mengandung unsur-unsur : (1) tujuan, (2) fakta-fakta, (3) perkiraan hari kemudian, dan (4) serangkaian perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan (Atmosudirdjo, 1980).

Berdasarkan pengertian perencanaan pada umumnya sebagaimana dikemukakan di atas, maka perencanaan pembangunan juga merupakan salah satu fungsi organik/penting dari manajemen pembangunan (Sugandha, 1986). Albert Weterson (dalam Tjokroamidjojo, 1984) memberikan pengertian perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut

dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Dalam hubungan ini, Tjokroamidjojo (1984) lebih jauh mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan Penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Ditinjau dari segi ruang/wilayah, maka perencanaan pembangunan dibagi kedalam :

a. Perencanaan Nasional, dengan batas wilayah perencanaan meliputi batas wilayah suatu negara tertentu;
b. Perencanaan daerah, yaitu perencanaan yang dikonsentrasikan dalam suatu batas daerah tertentu. Perencanaan daerah dibagi atas : (1) perencanaan daerah perkotaan; dan (2) perencanaan daerah pedesaan, yang membahas lebih mendalam aspek-aspek yang ada di desa, hubungan dan pengaruhnya terhadap sub-sistem lain dalam suatu kerangka sistem yang lebih luas (Sutami, dalam Firman dan Sirait, 1982).

BAB. III.
FUNGSI KOORDINASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Konsep Dasar Tentang Perencanaan Pembangunan di Indonesia.

1). Penyusunan Perencanaan.

Pembangunan dapat berarti pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan yang dimaksudkan disini adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan perubahan sosial dapat diartikan lebih luas ,misalnya pemerataan,apakah itu pemerataan pendapatan,pemerataan hasil-hasil pembangunan,pemerataan keadilan dan sebagainya.

Sebelum menyusun dan menyusun Repelita ,maka setiap Unit pelaksana di daerah ,misalnya Dinas atau Jawatan,yang yang vertikal maupun yang horisontal didalam setiap daerah harus membuat rancangan sementara dari rencana pembangunan. Tentu saja didalam pelaksanaannya ,disamping memperhatikan faktor-faktor diatas,maka program-program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi yang biasanya didasarkan pada hasil rapat Koordinasi pembangunan Daerah (RAKORBANGDA) ,juga perlu mendapatkan perhatian. Penyusunan rancangan tersebut dilaksanakan oleh organisasi yang lebih tinggi tingkatnya dan begitu seterusnya hingga sampai tingkat Departemen atau lembaga lain di tingkat Nasional. Selanjutnya rancangan-rancangan yang telah ditetapkan masih perlu dirumuskan dan disinkronisasikan sehingga menjadi Rencana Departemen yang biasanya disebut Rencana Sektoral. Ditingkat Propinsi ,organisasi Perencanaan resmi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda yang merumuskan kebijaksanaan Dasar pada tingkat Propinsi ,sedangkan di Daerah Kota dan Kabupaten Kebijaksanaan

Dasar Propinsi disusun,salah satunya,berasal dari usulan yang disampaikan oleh Bappeda.

Setelah perumusan Repelita Nasional dilaksanakan yang didasarkan pada Rencana-rencana Departemen/Dinas-Dinas serta Kebijaksanaan Dasar Propinsi,maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk selanjutnya mengusahakan adanya Peraturan Perundang-undangan. Sesudah Rencana Nasional itu dinyatakan sebagai berlaku untuk seluruh Indonesia dalam bentuk Repelita Nasional,maka di daerahj namanya disebut Repelita Daerah. (Soekartawi,1999).

2). Anggaran Pembangunan.

Untuk tingkat Nasional ,pembiayaan program-program yang dituangkan dalam Repelita Nasional dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) . Biaya ini dipakai untuk melaksanakan Repelita dari tahun ketahun selama kurun waktu Repelita tersebut. Rencana anggaran ini disampaikan kepada DPR\DPRD,yakni empat bulan sebelum anggaran tersebut berlaku secara efektif,jika DPR/DPRD menyetujui Rencana anggaran ini maka anggaran Nasional tersebut menjadi UU. Anggaran ini akan dilaksanakan dan dimulai pada setiap tanggal 1 April tahun berikutnya. Atas besar kecilnya anggaran ini,maka tiap Dinas/Departemen dan Lembaga-Lembaga lainnya merumuskan program-program operasional tahunannya. Biasanya secara formal anggaran ini diberikan kepada Departemen atau Dinas Propinsi sebelum tanggal 1 April untuk setiap tahunnya. Pemberian anggaran pembangunan ini secara formal diserahkan oleh para Menteri-Menteri kepada Gubernur.

APBN juga mencakup sumber-sumber keuangan,baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sumberdana yang berasal dari luar negeri misalnya bantuan dalam

bunga yang sangat rendah,sumbangan dan sebagainya dipergunakan untuk membiayai program-program pembangunan.

Ditingkat Propinsi,rencana atau rancangan pembangunan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD . Rencana tersebut dinamakan Rencana Daerah dan dapat diartikan bahwa anggarannya juga disetujui.

3). Pengawasan Pembangunan.

Dalam menyusun anggaran untuk merealisasikan rencana,maka Inspektur Pembangunan,Badan Pengawas Keuangan atau Bapeka,Inspektorat Jenderal,Direktorat Jenderal Anggaran,Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara bertindak selaku pengawas tentang penggunaan dana pembangunan.

Selanjutnya ditingkat Propinsi,tugas dari Organisasi-Organisasi atau Lembaga-lembaga pengawas ditingkat pusat tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah ,yang tugasnya melakukan aktivitas-aktivitas pengawasan ditingkat propinsi . Perlu diketahui bahwa Inspektur pembangunan akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya langsung kepada Presiden atau Wakil Presiden. Bapeka menyampaikan hasil kerjanya kepada DPR mengenai segala macam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran atau keuangan negara. Kemudian hasil pengawasan Bapeka juga datang dari Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal mempertanggung jawabkan tugasnya kepada menteri Keuangan,sedangkan Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri,melalui Gubernur.

B. Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Biasanya dalam Pembangunan daerah dikenal adanya dua pendekatan, yaitu pendekatan *topdown* dan pendekatan *bottom-up,* atau ada yang menyebut dengan pola strategi dari atas ke bawah *(top-down strategy),* dan pola strategi dari bawah ke atas *(bottom-up strategi).* Dalam pendekatan *top-down,* program pembangunan daerah ditetapkan dari atas atau dari pemerintah; sedangkan dalam pola *bottom-up,* program-program pembangunan ditetapkan atau direncanakan sendiri oleh masyarakat, baik atas prakarsa masyarakat sendiri maupun atas prakarsa pemerintah setempat melalui lembaga perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Arsyad (1999) mengklasifikasikan perencanaan pembangunan kedalam enam aspek : Pertama, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu perencanaan dapat dibagi menjadi tiga macam,yaitu perencanaan jangka panjang (perspektif), perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang oleh Sumidjo (1999) disebut sebagai perencanaan strategis atau Restra yang dapat disamakan denganb beberapa istilah dalam reverensi asing seperti *long range planning, long term planning, comprehenship planning.* Umumnya, jangka waktu perencanaan jangka panjang antara 10 - 25 tahun. Tujuan pokok rencana perspektif menurut Arsyad (1999) adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka menengah dan jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang hares diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka menengah dan jangka pendek. Tinbergen dalam Arsyad (1999) mengemukakan bahwa dalam rencana perspektif dapat diungkapkan kekuatan-kekuatan yang dampaknya dapat diperkirakan secara pasti dalam jangka panjang. Selanjutnya Steiner dan Miner (dalam Sumidjo, 1999) mengemukakan beberapa ciri perencanaan jangka panjang, yaitu bahwa

perencanaan jangka panjang :

(1) bersangkutan dengan masa depan dari keputusan-keputusan sekarang;

(2) suatu proses yang dimulai dengan pengembangan sasaransasaran atau *(objectives)* usaha penentuan strategi dan kebijakan-kebijakan guna mencapai sasaran usaha itu, serta mengembangkan rencana-rencana yang terinci guna menjamin pelaksanaan strategi;

(3) suatu falsafah *(way of life);* (4) suatu struktur dan rencana rencana terpadu; dan ditambahkan lagi oleh Albert Waterstone bahwa perencanaan jangka panjang bersifat (5) studi perkiraan atau proyeksi perkiraan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang (perencanaan perspektif); dan (6) berupa suatu perencanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang.

Perencanaan jangka menengah dalam pustaka bahasa Inggeris kurang-lebih sama dengan istilah-istilah : intermediate planning, medium rangeplanning, Jan medium range programming (Sumodjo, 1999). Selanjutnya dijelaskan bahwa biasanya perencanaan jangka menengah hanya mencakup fungsi-fungsi utama dan dikuantifikasikan dalam bentuk formulir-formulir yang sederhana. Perencanaan jangka menengah lebih banyak digunakan dalam pemerintahan, terutama dalam pembangunan nasional dan dapat mencakup program-program dan sasaran sektoral yang terperinci.

Tjokroamidjojo (1987) menjelaskan sebab-sebab sebagai berikut :

(1) cukup waktu untuk memperhitungkan tingkat pematangan pelaksanaan pembangunan berbagai program dan proyek;

(2) cukup waktu memperkirakan pemupukan sumber-sumber serta usaha meningkat sumbersumber pembiayaan;

(3) seringkali dapat menyesuaikan dengan periode pemerintahan atau lembaga perwakilan; dan

(4) sering kali pula waktu jangka menengah rencana pembangunan perjanjian Intemasional. Arsyad (1999) mengemukakan bahwa perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 - 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun masih umum, sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas. Rencana pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) merupakan rencana jangka menengah.

Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 - 2 tahun dan biasanya disebut juga rencana operasional tahunan (Sumodjo, 1999 dan Arsyad, 1999). Dalam kepustakaan berbahasa Inggeris, perencanaan jangka pendek kurang lebih sama dengan istilah-istilah : *short range planning, short term planning, operational planning, technical planning dan annual planning* (Sumidjo, 1999). Perencanaan jangka pendek pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga macam :

(a) perencanaan tahunan *(annual planning),* yaitu dalam rangka pentahapan, penterjemahan atau konkritisasi dari perencanaan jangka menengah dengan penyesuaian-penyesuaian bila diperlukan;

(b) perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah mendesak *(crash program) :* dan

(c) perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin yang dapat berupa perencanaan tri wulan, bulanan, mingguan, bahkan juga harian termasuk prosedure kerja dan cara-care kerja.

Kedua, Perencanaan berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : perencanaan dengan komando *(planning by direction)* dan perencanaan dengan rangsangan *(planning by inducement)*. Perencanaan dengan komando biasanya dilaksanakan di masyarakat sosialis seperti negara Uni Soviet. Perencanaan dengan cara ini tidak menghendaki adanya liberalisme. Pada sistem ini, pemerintah pusat merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dengan rangsangan, merupakan sistem perencanaan yang demokratis. Sistem ini dilakukan dengan cara memanipulasi pasar, tidak ada keharusan, tetapi ajakan. Ada kebebasan berusaha, kebebasan berkonsumsi, dan kebebasan berproduksi, tetapi kebebasan ini tunduk pads pengendalian dan pengaturan pemerintah (Arsyad, 1999). Dalam prakteknya, apakah suatu negara harus menerapkan suatu metode perencanaan dengan komando atau dengan rangsangan, tergantung sepenuhnya pads sistem pemenntahan yang ada. Negara dalam sistem sosialis tentu akan menerapkan perencanaan dengan komando dan negara dalam sistem kapitalis tentu akan menerapkan perencanaan dengan rangsangan. Namun demikian, kedua care perencanaan tersebut dapat dipadukan, karena keduanya saling melengkapi.

Ketiga, perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan dana (uang), sementara perencanaan fisik berkenaan dengan pengalokasian sumber daya secara fisik, misalnya manusia, bahan dan peralatan.

Keempat, perencanaan berdasarkan tingkat keluwesan, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif bersifat lebih luwes dalam pelaksanaannya sedangkan perencanaan imperatif lebih bersifat mengikat.

Kelima, perencanaan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, dapat dibagi menjadi tip macam, yaitu : perencanaan dalam sistem ekonomi kapitalisme, perencanaan dalam sistem ekonomi sosialisme, dan perencanaan dalam sistem ekonomi campuran. Perencanaan dalam sistem kapitalis tidak didasarkan pada rencana terpusat *(central plan)*. Dengan tidak adanya rencana pusat, maka alat-alat produksi bisa dimiliki secara pribadi dan biasanya proses produksi dilaksanakan oleh swasta. Harga produksi ditentukan oleh kekuatan pasar dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dalam lingkup yang terbatas, yaitu untuk mengekang pamrih pribadi demi pelayanan masyarakat secara keseluruhan, dan untuk melengkapi sistem harp serta menjamin agar sistem ini bekerja secara efisien. Perencanaan dalam sistem sosialis didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada penguasa atau badan perencanaan pusat yang merumuskan rencana bagi keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana selama jangka waktu yang ditetapkan pemenntah mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana.

Perencanaan dalam sistem ekonomi campuran adalah gabungan dua sistem ekonomi, kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini merupakan sistem yang bebas dari kejelekan sistem kapitalisme dan sosialisme, tetapi menyatupadukan segi-segi baiknya. Lewat perencanaan, kelebihan perekonomian sosialis dikembangkan dan kekurangan dalam kapitalis dicoba untuk diubah. Perencanaan dalam ekonomi campuran ini tidak bersifat bersifat menyeluruh seperti pada perencanaan sosialis. Di dalam perekonomian campuran ada sektor swasta dalam mana perorangan mengelola sendiri apa yang mereka miliki. Dalam hal ini pemerintah mengatur kelangsungan hidup sektor ini melalui upaya pembinaan, subsidi, fasilitas kredit, bahan mentahtenaga murah, konsesi dan sebagainya.

Keenam, perencanaan berdasarkan cars pelaksanaannya, perencanaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu : perencanaan sentralistik *(centralized)* atau perencanaan dari atas *(top down planning)* dan perencanaan desentralistik *(decentralized)* atau perencanaan dari bawah *(bottom up planning)*. Pada perencanaan sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada dibawah perencanaan pusat. Badan ini merumuskan suatu rencana pusat, menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas untuk setiap sektor perekonomian.

Perencanaan desentralistik mengacu pada perencanaan dari *bawah(bottom up planning)*. Perencanaan ini drrmuskan oleh badan perencanaan pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara. Rencana pusat ini menggabungkan dengan rencana daerah/wilayah.

Bryant & White (1987) mengemukakan perlunya mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan karena adanya pertimbanganpertimbangan sebagai berikut

(1) Melalui mekanisme *bottom up,* masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau *feed back* kepada pihak atas (pemerintah) mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lain-lain;

(2) Melalui mekanisme *bottom up,* masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutannya kepada pemerintah;

(3) Melalui mekanisme *top-down* dan *bottom up* dapat dilakukan komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah;

(4) Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, permufakatan, atau kompromi atau cooperation antara masyarakat dengan pemerintah;

(5) Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi proses "exchange" antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk mengefektifkan perencanaan pembangunan desa dengan pendekatan dan bawah *(bottom-up)* maka pemerintah mulai tahun 1996 melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen

Dalam Negeri mengembangkan suatu metode atau pendekatan yang disebut "Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa" atau disingkat P3MD.

Pada prinsipnya P3MD mempunyai tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Dengan metode atau pendekatan tersebut diharapkan perencanaan pembangunan desa lebih berdayaguna (efisien) dan berhasil-guna atau efektif (Depdagri, 1996).

Kaitannya dengan perencanaan pembangunan, maka program pembangunan tingkat nasional dikenal dengan istilah Propenas berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Program Pembangunan Daerah yang dikenal dengan istilah Propeda.

C. Fungsi Koordinasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah diuraikan bahwa koordinasi merupakan fungsi manajemen yang penting di dalam setiap usaha kerjasama manusia. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang mengikutsertakan beberapa banyak orang, ataupun beberapa unit atau instansi sekaligus, fungsi koordinasi memegang peranan penting. Hal tersebut terutama disebabkan karena koordinasi mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi), dan dilakukan secara serasi dan sinkron/simultan dalam seluruh tindakan yang dijalankan dalam setiap usaha kerjasama.

Dalam kegiatan pembangunan, koordinasi juga merupakan salah satu fungsi manajemen pembangunan daerah yang harus dilakukan guns menjamin kelancaran mekanisme kerja pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan dan berbagai sasaran/target yang hendak dicapai. Dan fungsi koordinasi ini

perlu dipersiapkan sejak tahap-tahap awal atau tahap permulaan kegiatan/program yang bersangkutan. Koordinasi dimaksud lazim disebut koordinasi dalam perencanaan atau *coordination by planned* (Westra, 1983).

Seperti yang telah dikemukakan bahwa perencanaan pembangunan itu pada dasarnya berkisar pada pemilihan tujuan dan sasaran-sasaran rencana pembangunan, serta pads kebijaksanaan dan cars untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumber daya yang ada. Dalam penetapan tujuan/sasaran dan terutama dalam penentuan cara pencapaian tujuan/sasaran pembangunan itu, maka salah satu unsur penting dari perencanaan yang meminta perhatian adalah pelaksanaan koordinasi (Tjokroamidjojo, 1984). Dengan demikian, koordinasi memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pentingnya koordinasi dalam perencanaan oleh karena pada hakekatnya koordinasi dapat mencegah hambatan-hambatan dan masalah yang timbul dan rencana atau hasil rencana pembangunan itu sendiri, seperti: kekacauan, kekembaran/duplikasi, tumpang tindih, kemubasiran, dan lain-lain sebagainya yang dapat menimbulkan ketidakefisiennya dan tidak efektifnya rencana ataupun program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, makna peranan fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan adalah untuk terciptanya rencana ataupun program pembangunan yang terpadu, integrasi, serasi, dan sinkron atau simultan. Dengan adanya koordinasi yang penting di antara orang-orang ataupun pejabat-pejabat berbagai lembaga/instansi/dinas-dinas pemerintah yang melaksanakan perencanaan pembangunan, akan terjadi interaksi yang harmonis, akan tercipta keterpaduan antara rencana dan program atau kegiatan, terhindarnya dari adanya kesimpang-siuran dan lain-lain sebagainya yang mengurangi daya guna pembangunan. Betapa pentingnya peranan fungsi koordinasi dalam perencanaan, sehingga

ditetapkanlah mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di tingkat Propinsi di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan di tingkat Kabupaten/Kotamadya di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, dan seterusnya hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

BAB. IV
KESIMPULAN

perencanaan/planning merupakan suatu fungsi fundamental daripada proses manajemen dapat juga dikatakan bahwa perencanaan merupakan landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sedangkan Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara of sien dan efektif dapat memberi basil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Sedangkan koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien atau sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan. Di dalam mencapai tujuan bersama, dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadinya kekacauan, percekcokkan, perkembaran atau kekosongan kerja, sebagai akibat daripada pekerjaan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya dalam suatu kerja sama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.

Untuk terciptanya kerjasama yang harmonis serta kesatuan tindakan, gerak dan program antara unit-unit organisasi ataupun antara instansi/lembaga/Dinas dalam melaksanakan pembangunan di Daerah diperlukan koordinasi yang balk.

Dengan suatu sistem koordinasi dan perencanaan pembangunan yang teratur dan baik antara pelaksana dengan prasarana dan sarana yang tersedia, tentu akan mempengaruhi pencapaian hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Atmosudirdjo, P, 2001, Dasar-Dasar Manajemen dan Office Managemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Azrul, A, 1995, Dasar-Dasar Perencanaan Bidang Kesehatan, Fakultas Kedokteran UL Jakarta.

Dimock M.E dan G.O. Dimock, 1989, Administrasi Negara, Terjemahan Endy Rukno, Erlangga, Jakarta.

Kartasasmita, G, 1997, Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia), Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.

Manulang, 1992, Dasar-Dasar Manajemen, Deli, Medan.

Moekijat, 1995, Prinsip-Prinsip Manajemen Suatu Tanya Jawab, Jilid I Alumni, Bandung.

Sondang. S.P, 2002, Filasafat Administrasi, Cetakan Ke IV Gunung Agung. Jakarta

---------- , 1978, Peranan Staf Dalam Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.

Stoner F.A.J dan C. Wankel, 1986, Manajemen, Terjemahan Bakowatum, Intermedia, Jakarta.

Sugandha D, 1998, Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia, Jakarta.

Sumidjo, W, 1999, Strategi Perencanaan, Bahan Diklat SPAMA, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

Sutarto, 1981, Dasar-Dasar Organisasi, Cetakan Ke III, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, B.,, 1994, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.